

Tes Ulang Pegawai Tidak Tetap

► Perumda Delta Tirta Kelebihan Karyawan

SIDOARJO, SURYA - Perumda Delta Tirta atau sebelumnya bernama PDAM Delta Tirta Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait adanya temuan kelebihan kapasitas pegawai di perusahaan milik Pemkab Sidoarjo tersebut.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo bakal melakukan asesmen ulang atau tes ulang terhadap pegawai tidak tetap menyusul temuan adanya kelebihan kapasitas pegawai sebanyak 45 orang.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri Apel Akbar Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-48 Perumda Delta Tirta di Sidoarjo, Senin (6/7). Menurut Subandi, selain membenahi manajemen internal dan merombak jajaran direksi,



SURYA/M. TAUFIK

APEL AKBAR - Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri Apel Akbar HUT Ke-48 Perumda Delta Tirta di Sidoarjo, Senin (6/7).

evaluasi kompetensi pegawai menjadi agenda utama dalam upaya pembersihan dari praktik rekrutmen yang tidak transparan. Dari hasil asesmen ulang itu, mereka yang mampu dan kompeten akan diangkat menjadi pegawai tetap. "Saat ini terjadi kelebihan (kapasitas) seba-

nyak 45 orang. Pegawai yang belum berstatus tetap akan kami asesmen ulang. Mereka yang masuk melalui jalur titipan harus berhati-hati," ujar Subandi tegas di hadapan ratusan pegawai.

Kelebihan beban kerja ini, lanjut bupati, dipicu oleh praktik rekrutmen masa lalu

yang tidak taat asas. Ia mencontohkan, formasi yang dibuka hanya untuk 10 lowongan, namun jumlah pegawai yang lolos dan masuk justru membengkak hingga 20 orang. Subandi memastikan praktik serupa tidak boleh terulang lagi di lingkungan BUMD tersebut.

Melalui tes ulang ini, Pemkab akan memetakan ulang kompetensi para pegawai tidak tetap. Bagi mereka yang terbukti mampu dan memiliki kompetensi tinggi, manajemen berkomitmen untuk mengangkatnya menjadi pegawai tetap. "Kami ingin Delta Tirta memiliki empati yang tinggi terhadap pelayanan publik, jujur, dan bersih. Jika komitmen ini terlaksana, tentu ada insentif tinggi yang disiapkan bagi pegawai," kata Subandi. (uif)

BUS SEKOLAH GRATIS DI SIDOARJO

MASUK TAHAP PENGADAAN



Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan program angkutan sekolah gratis untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan gratis bagi siswa saat berangkat maupun pulang sekolah.

“Bus sekolah saat ini masih dalam proses pengadaan. Nantinya akan tersedia lima unit bus dengan kapasitas masing-masing 30 tempat duduk untuk melayani angkutan sekolah gratis.”

BUDI BASUKI

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
Senin (6/7)



5 UNIT BUS
akan disediakan



30 PENUMPANG
kapasitas per bus



TAHAP PENGADAAN
saat ini dalam proses pelaksanaan



SEGERA BEROPERASI
untuk melayani para pelajar

5 KORIDOR LAYANAN (TAHAP AWAL)



JADWAL OPERASI

Mulai beroperasi setiap hari sekolah sejak pukul

05.30 WIB



SASARAN PELAJAR



DIPRIORITASKAN SMP & SMA



karena jarak tempuh menuju sekolah umumnya lebih jauh.



BELUM MENJADI SASARAN SD



sebagian besar sekolah dasar berada di sekitar lingkungan tempat tinggal sehingga masih mudah dijangkau.

MANFAAT PROGRAM BUS SEKOLAH GRATIS



Meningkatkan keselamatan pelajar dalam perjalanan ke sekolah



Mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi



Memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan gratis bagi pelajar



Membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam berangkat dan pulang sekolah

Lima Bus Sekolah Gratis Masuk Tahap Pengadaan

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera merealisasikan program angkutan sekolah gratis. Sebanyak lima unit bus berkapasitas 30 penumpang kini memasuki tahap pengadaan dan ditargetkan segera beroperasi untuk

melayani para pelajar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, armada tersebut disiapkan untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan gratis bagi siswa saat berangkat

kat maupun pulang sekolah.

“Bus sekolah saat ini masih dalam proses pengadaan. Nantinya akan tersedia lima unit bus dengan kapasitas masing-masing 30 tempat duduk untuk melayani angkutan

● Ke Halaman 10



Lima Bus Sekolah...

sekolah gratis,” ujar Budi Basuki, Senin (6/7). Pada tahap awal, Dishub menyiapkan lima koridor yang memiliki mobilitas pelajar cukup tinggi. Jalur tersebut meliputi Waru-Candi, Candi-Waru, serta rute dari Porong, Wonoayu, dan Krian

menuju pusat Kota Sidoarjo.

Menurut Budi, seluruh rute telah disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan. Dishub menentukan titik naik dan turun penumpang, lokasi halte, serta menghitung waktu tempuh di setiap koridor agar para pelajar dapat tiba di sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

mulai beroperasi setiap hari sekolah

sejak pukul 05.30 WIB. Layanan diprioritaskan bagi pelajar jenjang SMP dan SMA karena umumnya memiliki jarak tempuh yang lebih jauh menuju sekolah. Sementara itu, siswa SD belum menjadi sasaran program. Pasalnya, sebagian besar sekolah dasar berada di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa sehingga masih mudah dijangkau.

Program bus sekolah gratis ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelajar terhadap kendaraan pribadi, meningkatkan keselamatan perjalanan menuju sekolah, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam berangkat dan pulang sekolah. (dik/vga)

run melalui sisi belakang tower dan berhasil malarikan diri. Sementara



BERITA METRO
www.beritametro.id

Bupati Subandi Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Cegah Narkoba

SIDOARJO (BM) - Bupati Sidoarjo Subandi mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penguatan peran keluarga, lingkungan, serta pemerintah daerah.

Menurut Subandi dalam sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta jalan sehat anti narkoba dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 di Lapangan Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Minggu, narkoba merupakan musuh nyata yang merusak masa depan bangsa.

"Narkoba menjadi musuh nyata yang merusak masa depan bangsa. Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Kita semua harus bergerak bersama melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," kata Subandi dalam keterangan

diterima di Sidoarjo, Minggu (5/7).

Subandi menegaskan keberhasilan P4GN membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, rukun tetangga, rukun warga, pemerintah desa hingga pemerintah daerah agar upaya pencegahan berjalan efektif.

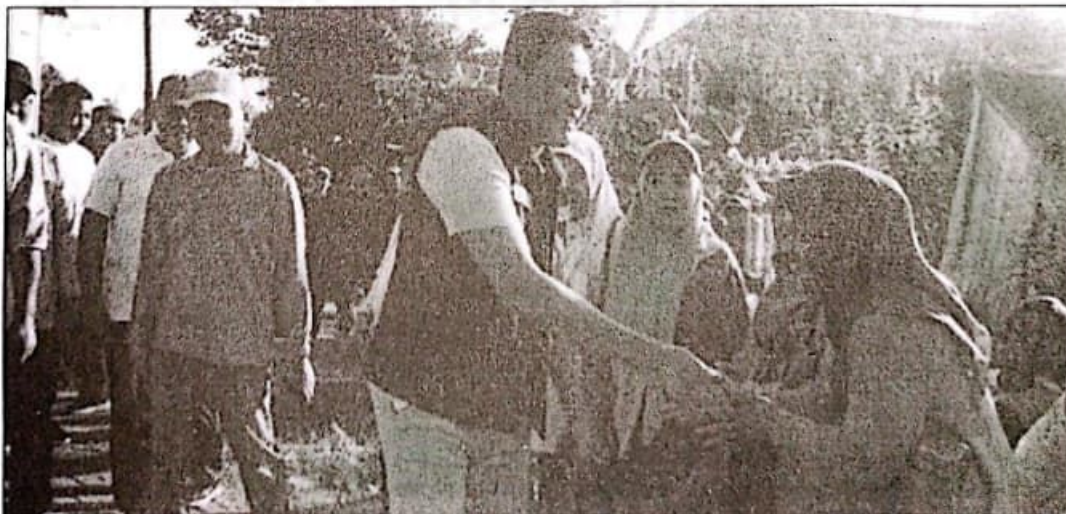
Menurutnya, jalan sehat yang digelar tidak hanya menjadi kegiatan olahraga bersama, tetapi juga menjadi simbol komitmen masyarakat Sidoarjo dalam menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dirinya turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar karena Kecamatan Wonoayu merupakan wilayah dengan jumlah kasus narkoba tertinggi kedua di Kabupaten Sidoarjo sehingga hal tersebut memerlukan perhatian serius dari masyarakat.

Subandi mengatakan, peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk melakukan deteksi dini terhadap perilaku yang mencurigakan agar penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sejak awal dan tidak meluas di lingkungan sekitar.

"Mari kita mulai dari keluarga, kemudian lingkungan, RT, RW, hingga desa. Saya yakin apabila semangat kebersamaan ini terus dijalankan, kita bisa melindungi generasi muda dan mewujudkan Sidoarjo yang bebas dari narkoba," ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo atas sinergi dalam menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut. (udi)



SOSIALISASI P4GN: Bupati Sidoarjo, Subandi (tengah), menyapa warga yang mengikuti rangkaian sosialisasi P4GN dan jalan sehat di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Minggu (5/7). Subandi mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penguatan peran keluarga, lingkungan, serta pemerintah daerah.

Wonoayu, Jadi Kecamatan Tertinggi Kedua Kasus Narkoba

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Kecamatan Wonoayu disebut menjadi wilayah dengan kasus narkoba tertinggi kedua di Kabupaten Sidoarjo. Menyikapi kondisi itu, Bupati Sidoarjo Subandi pun mengajak masyarakat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkungan keluarga hingga desa.

Pesan itu disampaikan Subandi dalam Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 di Lapangan Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu.

Subandi menegaskan, perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga berperan penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

“Narkoba menjadi musuh nyata yang merusak masa depan bangsa. Pencegahan



Bupati Subandi dalam sosialisasi P4GN.

tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Kita semua harus bergerak bersama melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” ujar Subandi, Senin (6/7/2026).

Ia meminta masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, keluarga, tetangga, pengurus RT/RW, hingga pemerintah desa harus aktif melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan. Subandi menegaskan, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh

elemen masyarakat.

“Mari kita mulai dari keluarga, kemudian lingkungan, RT, RW, hingga desa. Saya yakin apabila semangat kebersamaan ini terus dijalankan, kita bisa melindungi generasi muda dan mewujudkan Sidoarjo yang bebas dari narkoba,” tuturnya.

Subandi juga mengapresiasi sinergi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang-pol) Sidoarjo dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. (md/rus)

Soroti Tingginya Kasus Narkoba di Wonoayu

WONOAYU-Kecamatan Wonoayu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam upaya pemberantasan narkoba. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang menempatkan Wonoayu sebagai wilayah dengan kasus tertinggi kedua di Kabupaten Sidoarjo mendorong Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat ikut menjadi garda terdepan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ajakan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Jalan Sehat Anti Narkoba dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 di Lapangan Desa Wonokalang,



GARDA TERDEPAN: Bupati saat bertemu warga di kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di Wonoayu. Kecamatan Wonoayu, Minggu (5/7).

Menurut Subandi, perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat

menjadi kunci utama dalam melakukan pencegahan, termasuk melalui deteksi dini terhadap perilaku mencurigakan di lingkungan sekitar.

"Mari kita mulai dari keluarga, kemudian ling-

kungan, RT, RW, hingga desa. Saya yakin apabila semangat kebersamaan ini terus dijalankan, kita bisa melindungi generasi muda dan mewujudkan Sidoarjo yang bebas dari narkoba," tegasnya. (dik/vga)

Kantor
Lela
Indri
No.
1
Yar
Har
Tar
Wa
Ba
Al
Te
Pa
Sh
1
2
3
4
5.

Bupati Ultimatum Direksi Baru Perumda Delta Tirta, Gagal Capai Target Setahun Harus Mundur

■ Segera Diumumkan

KOTA-Seleksi jajaran direksi baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo telah rampung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengumumkan tiga nama yang akan mengisi jabatan Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Pelayanan.



Bupati Sidoarjo Subandi

Tak hanya dituntut membawa perubahan, para direksi terpilih juga harus siap menerima konsekuensi apabila gagal memenuhi target kinerja. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, seluruh direksi yang akan dilantik telah menandatangani pakta integritas yang mewajibkan mereka mengundurkan diri jika dalam satu tahun tidak mampu mencapai target yang

telah ditetapkan.

Pernyataan itu disampaikan Subandi saat memimpin apel akbar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Senin (6/7).

Menurut Subandi, proses seleksi telah selesai dan kini tinggal menunggu penyampaian administrasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah seluruh tahapan

tersebut rampung, direksi baru akan segera diumumkan dan mulai bekerja.

"Ini kita sudah selesai. Insyaallah minggu ini atau minggu depan kita daftarkan ke Kemendagri. Setelah selesai ya langsung kerja. Semua sudah settle. Sudah kita koordinasikan dengan tim panel, Bupati, Wakil Bupati, semuanya sudah

● Ke Halaman 10



Bupati Ultimatum...

kita ajak koordinasi. Tinggal kita umumkan saja," ujarnya.

Ja memastikan pengumuman direksi baru ditargetkan dilakukan pada bulan ini. Masing-masing posisi telah memiliki satu kandidat yang dinyatakan lolos seleksi.

"Sudah terpilih. Juga ada komitmen,

apabila dalam satu tahun tidak memenuhi target, ya siap mengundurkan diri. Itu sudah tertuang dalam pakta integritas yang kita siapkan," tegasnya.

Subandi menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi Perumda Delta Tirta agar dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat. "Pemerintah daerah tidak main-main dalam menentukan pimpinan, terutama di PDAM Delta Tirta Sidoarjo," katanya.

Ja juga menegaskan adanya praktik titipan dalam proses pemilihan direksi. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi dan hasil asesmen sehingga menghasilkan pimpinan yang benar-benar

profesional. "Kita ingin profesional. Ini bagian dari pembiasaan. Kalau ada titipan, nanti saat muncul persoalan jadinya ewuh pekewuh. Saya tidak mau seperti itu," ujarnya.

Subandi menambahkan, evaluasi terhadap direksi nantinya sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja, bukan karena faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu.

"Kalau tidak mampu menjalankan fungsi sebagai Direktur PDAM, pelayanannya tidak profesional, ya kita hentikan sesuai hasil evaluasi kinerjanya. Makanya kita membangun profesionalisme. Tujuannya mengubah mindset di Kabupaten Sidoarjo sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi beban PDAM di usia ke-48 ini," pungkasnya. (dik/vga)



Penjualan Anjlok, Perajin Tas Tanggulangin Kian Menyusut

Dewan Desak
Pemkab
Selamatkan
Sentra Tas
dan Koper

SIDOARJO – Kejayaan sentra tas dan koper Tanggulangin terus memudar. Dari ribuan perajin yang dulu meramaikan kawasan itu, kini tersisa sekitar 200 orang. Tahun ini, jumlah perajin berkurang 200 orang gara-gara penjualan anjlok. Berkurangnya pembeli bisa dilihat dari kondisi keuangan Koperasi Industri Tas dan Koper (Intako). Karyawan pada koperasi yang dibentuk perajin tas dan koper Tanggulangin itu menyusut dari 80 orang tinggal sekitar 20 orang.

Ketua Koperasi Intako Zainul Arifin mengatakan, perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi tantangan terbesar yang diha-



MENURUN: Pengunjung Koperasi Intako terus berkurang setelah terdampak bencana Lumpur Sidoarjo dan Covid-19.

dapi perajin. Konsumen kini lebih banyak membeli produk melalui marketplace sehingga kunjungan ke *showroom* menurun. Bahkan, penjualan turun 50 persen setiap tahun.

"Penurunan penjualan sangat drastis. Banyak yang beralih ke online," kata Zainul. Dia menyebut, dulu Koperasi Intako penuh antrean bus pariwisata yang mampir. Saat ini deretan *showroom* yang dulu dipenuhi pengunjung banyak yang tutup. "Kami juga masih terbebani utang," tambah Zainul.

Menurutnya, kesulitan membayar pinjaman mulai dirasakan sejak terjadinya Lumpur Lapindo yang memutuskan akses pariwisata. Lalu munculnya media sosial pada 2010. Kondisi itu kemudian diperparah pandemi Covid-19 dan perubahan pola belanja masyarakat ke platform digital.

Petakan Masalah

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebut jika kondisi Intako menjadi peringatan bagi Pemkab. Menurutnya, Tanggulangin bukan

sekadar kawasan industri, tetapi juga ikon wisata belanja yang telah menghidupi ribuan warga selama puluhan tahun. "Saya minta pemerintah tak diam. Segera petakan apa masalahnya," kata Nasih.

Dia meminta Pemkab segera menyiapkan langkah penyelamatan. Mulai dari penguatan promosi, penyelenggaraan event, perluasan akses pameran, hingga pelatihan bagi perajin muda. "Kami sudah meminta

Komisi B berkoordinasi dengan Disperindag untuk melihat langkah konkret yang sudah disiapkan," kata Nasih. (ful/hen)



Saya minta pemerintah tak diam. Segera petakan apa masalahnya."

Abdillah Nasih
Ketua DPRD Sidoarjo



Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BERANTAS: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana ikut memusnahkan barang bukti rokok ilegal sebagai bentuk komitmen memberantas peredarannya.

Wabup Minta Jalur Distribusi Rokok Ilegal dari Luar Daerah Diputus

KOTA-Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan perang terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo harus terus diperkuat. Menurutnya, sebagian besar rokok ilegal yang beredar di wilayahnya bukan diproduksi di Sidoarjo, melainkan masuk dari luar daerah melalui jalur distribusi tertentu. Karena itu, Mimik meminta Bea Cukai bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo

meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo menjadi tugas pemerintah untuk dipertahankan pengawasannya. Barang ini bukan berasal dari Sidoarjo, tetapi sebagian besar masuk dari luar daerah," ujar Mimik, Senin (6/7).

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya

• Ke Halaman 10



Wabup Minta Jalur...

dilakukan melalui operasi penindakan. Satpol PP juga diminta lebih aktif melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pedagang agar memahami risiko hukum jika tetap menjual rokok ilegal.

"Satpol PP juga harus sering berkomunikasi dengan para pengecer rokok yang masih menjual produk ilegal di masyarakat," tegasnya.

Mimik menjelaskan, pendekatan persuasif kepada para pedagang penting dilakukan agar mereka memahami konsekuensi hukum sekaligus ber-

sedialah menghentikan penjualan rokok tanpa pita cukai resmi.

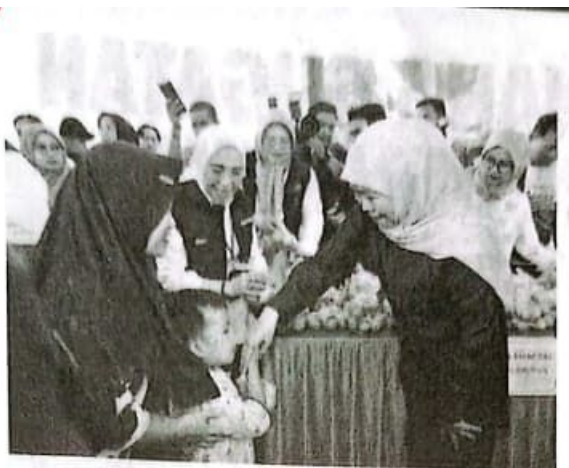
Meski demikian, ia menegaskan penindakan tidak boleh berhenti di tingkat pedagang atau pengecer. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga harus mampu memutus mata rantai distribusi rokok ilegal yang me-

masuk barang dari luar daerah ke Sidoarjo. "Ke depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan bertindak lebih tegas. Bea Cukai juga harus lebih teliti dan lebih tegas dalam melakukan penindakan," katanya.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bea Cukai, dan

Satpol PP mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan. Upaya tersebut tidak hanya melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, tetapi juga menjaga penerimaan negara dari sektor cukai yang selama ini dirugikan akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. (dik/vga)





Gubernur Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi dan Gerakkan UMKM Lewat Pasar Murah di Desa Bulukandang Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri,-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan Pasar Murah. Kali ini, Pasar Murah ke-81 Tahun 2026 digelar di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/7).

Gelaran ini menjadi Pasar Murah ke 81 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sepanjang tahun ini. Hal tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperluas pemerataan intervensi pangan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

Gubernur Khofifah mengatakan, Pasar Murah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis yang selama ini menjadi penyumbang inflasi. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga.

"Pasar Murah ini akan terus kita lanjutkan di berbagai daerah di Jawa Timur. Tujuannya agar masyarakat memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau, sementara stabilitas harga tetap terjaga," ujarnya.

Khofifah menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar. Pemerintah juga harus hadir dengan intervensi langsung agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ketika harga pangan stabil dan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, maka daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Inilah yang terus kita ikhtiarkan bersama," katanya.

Dalam Pasar Murah kali ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, cabai Rp5.000 per 200 gram, telur ayam ras Rp20.000 per kemasan, serta daging ayam ras Rp25.000 per kemasan. (hms)



Wabup Sidoarjo Tanam 644 Pucuk Merah

Ajak PKL dan Warga Jaga Kebersihan

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana memimpin penanaman 644 bibit pucuk merah dalam Program 1 PNS 1 Pohon Gelombang IV di Jalan Raya Gading Fajar 2 hingga Desa Sepande, Kecamatan Candi.

Kegiatan penghijauan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PLN Sidoarjo, serta RSIA Ibu dan Anak Pondok Jati.

Sebanyak 644 bibit pucuk merah ditanam di sepanjang ruas jalan sebagai upaya memperluas ruang hijau sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih teduh, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mimik Idayana mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan tersebut. Menurutnya, kesempatan berjualan yang telah diberikan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan.

"Saya mohon kepada para PKL yang sudah diberikan kesempatan untuk berjualan di sini agar benar-benar menjaga kebersihan. Sampahnya jangan ditinggalkan begitu saja. Kalau memungkinkan, sampahnya dibawa pulang. Jangan dibuang sembarangan sehingga

membuat lingkungan menjadi kotor," tegasnya.

Selain itu, ia mengatakan penanaman pohon bukan sekadar mempercantik kawasan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk merawatnya. Ia berharap masyarakat, termasuk warga sekitar dan para PKL, ikut menjaga pohon-pohon yang telah



Wabup Mimik Idayana memimpin penanaman 644 bibit pucuk merah di Kecamatan Candi, Sidoarjo.

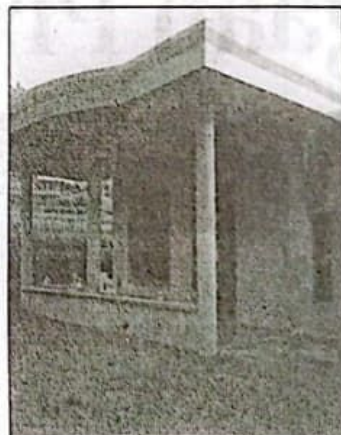
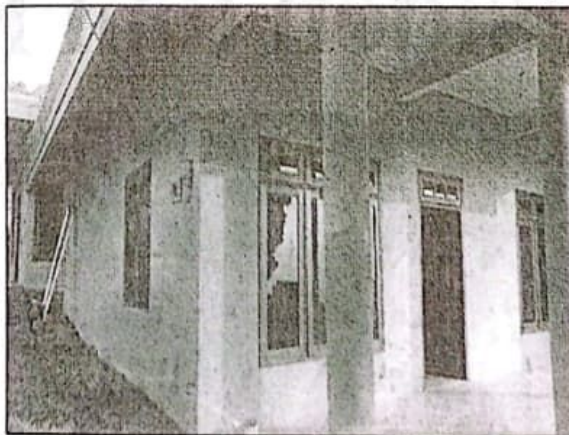
ditanam agar tumbuh dengan baik.

"Sebanyak 644 pohon yang kita tanam hari ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Saya berharap seluruh masyarakat ikut menjaga pohon-pohon ini karena manfaatnya akan

kembali kepada kita semua," ujarnya.

Ia menambahkan, mewujudkan Sidoarjo yang hijau, bersih, dan nyaman membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat yang dimulai dari lingkungan terdekat. (hum/jok/fer)

DIJUAL CEPAT Vila Pacet. Luas Tanah 420 M2



Lokasi = RT 03 RW 01 Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Status Tanah SHM (Sertifikat Hak Milik). Atas nama sendiri.

Fasilitas = 3 KT, 4 KM, 3 RT, 2 Teras dan 1 Dapur plus Halaman Luas.

Lokasi strategis dekat Pemandian Air Panas Pacet. **HARGA BISA NEGOTIASI**

Berminat Hubungi = Telepon 081235363721



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

66 Negara Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

RUU untuk Pidanakan LGBT Masih Dikaji

Aksi menolak praktik LGBT kerap disuarakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.



Di tengah semakin meluasnya kampanye legalisasi hubungan sesama jenis di berbagai negara, masih terdapat 66 negara yang mempertahankan aturan hukum yang melarang hubungan homoseksual. Data tersebut merupakan pembaruan terbaru yang dirilis situs Erasing 76 Crimes pada Juni 2026 lalu.

LAPORAN itu menunjukkan, jumlah negara yang masih memiliki undang-undang anti-homoseksual terus mengalami perubahan. Di satu sisi, sejumlah negara mencabut ketentuan pidana tersebut

❖ Bersambung ke Hal. 11

Redaksi/Pemasaran/Iklan Jalan Cipta Menanggal I/35 Surabaya | Telepon (031) 827

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

● RUU...

Sambungan dari halaman 1

melalui putusan pengadilan atau perubahan undang-undang.

Namundisisilain,beberapa negara justru mengadopsi aturan baru yang memperkuat kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis.

Perubahan terbaru datang dari Niger. Negara di Afrika Barat itu resmi melarang homoseksual pada 11 Juni 2026. Sebelumnya, Burkina Faso dan Mali juga mengesahkan aturan serupa sepanjang 2025 sehingga menambah jumlah negara yang masih mempertahankan larangan serupa.

Situs Erasing 76 Crimes menyebutkan, kini terdapat 66 negara yang masih memiliki undang-undang anti-homoseksual.

Pernyataan itu menjadi gambaran bahwa meskipun tren dekriminalisasi terus berlangsung di sejumlah kawasan, masih banyak negara yang memilih mempertahankan aturan tersebut sesuai sistem hukum dan nilai yang dianut masing-masing. Dari total 66 negara tersebut, kawasan Afrika menjadi wilayah dengan jumlah negara terbanyak yang masih memiliki larangan terhadap homoseksual.

Dilansir dari MUI Digital, berikut negara-negara yang memiliki larangan terhadap homoseksual: Aljazair, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Chad, Komoro, Mesir, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Nigeria,

Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe.

Sementara di kawasan Asia dan Timur Tengah, negara-negara yang masih memiliki aturan serupa yaitu sebagai berikut: Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Oman, Pakistan, Palestina (khusus Jalur Gaza), Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka, Suriah, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yaman

Di kawasan Amerika, kriminalisasi homoseksualitas masih berlaku di sejumlah negeri yaitu: Grenada, Guyana, Jamaika, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad dan Tobago.

Sedangkan di kawasan Oseania, negara-negara yang masih mempertahankan larangan tersebut meliputi: Kiribati, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga dan Tuvalu.

Adapun Eropa menjadi satu-satunya kawasan yang tidak lagi memiliki negara yang melarang homoseksual. Siprus Utara menjadi wilayah terakhir di Eropa yang mencabut aturan tersebut pada Januari 2014.

Salah satu hal yang menarik perhatian dalam laporan tersebut adalah masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang masih melarang homoseksual.

Namundemikian, status Indonesia berbeda dengan sebagian besar negara lainnya. Indonesia tidak memiliki aturan pidana nasional yang secara khusus mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa

nemerintah daerah. *di publikasikan*

berdasarkan persetujuan. Indonesia dicantumkan dalam laporan tersebut karena terdapat ketentuan hukum yang berlaku di beberapa daerah.

Di sisi lain, publik ramai mengulas agar pelaku LGBT dipidana. Komisi VIII DPR terbuka menerima usulan pembentukan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku LGBT, sepanjang diajukan sesuai mekanisme perundang-undangan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, mengatakan, setiap usulan pembentukan undang-undang harus diawali dengan penyusunan naskah akademik yang memuat kajian komprehensif, termasuk pandangan masyarakat mengenai urgensi regulasi tersebut. "Ya, kalau membuat undang-undang harus ada naskah akademik. Di naskah akademik itu akan tertuang kajian, termasuk pendapat masyarakat yang sudah menyaksikan atau merasakan dampak," ujar Marwan, Senin (6/7/2026)

Marwan menilai, apabila hasil kajian dalam naskah akademik menunjukkan adanya kebutuhan pembentukan regulasi, maka usulan tersebut dapat diajukan melalui mekanisme yang berlaku. "Tentu ada mekanisme perumusan pembuatan undang-undang," kata Legislator PKB ini.

Namun demikian, Marwan mengungkapkan hingga saat ini Komisi VIII DPR belum menerima usulan resmi mengenai pembentukan RUU yang mengatur pemidanaan terhadap LGBT. "Belum, belum ada," tandas Marwan. (rmol/lan)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

APARATUR SIPIL NEGARA: Sejumlah kepala OPD mengikuti apel di halaman kantor bupati. Jabatan lima kepala OPD masih diisi pelaksana tugas.

Lima Jabatan Kepala OPD Masih Kosong

Dispendikbud, DLHK, hingga RSUD R.T. Notopuro

SIDOARJO – DPRD menyoroti banyaknya jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang kosong. Ada lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini dijabat pelaksana tugas (Plt). Jumlah jabatan yang kosong berpotensi bertambah setelah dua kepala OPD dijadwalkan pensiun sebelum akhir tahun.

Lima OPD yang saat ini dipimpin plt meliputi dinas pendidikan dan kebudayaan (Dispendikbud), dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK), dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag), badan pelayanan pajak daerah

(BPPD), serta RSUD R.T. Notopuro. Di luar itu, jabatan Camat Krian juga masih dijabat Plt.

Daftar jabatan kosong bakal bertambah jika Pemkab tidak segera mengisi posisi pejabat definitif. Sekretaris DPRD Hari Sucahyono memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang Bachruni Aryawan juga menyusul pensiun pada akhir Desember.

Pengaruh Kinerja

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin meminta Pemkab agar pengisian pejabat definitif tidak berlarut-larut. Menurutnya, jabatan plt memiliki batas kewenangan dibanding pejabat definitif. Kalau terlalu lama dijabat plt tentu mempengaruhi kinerja.

Ada kewenangan yang tidak bisa dijalankan," katanya kemarin (6/7).

Rizza mengingatkan jangan sampai jumlah OPD yang dipimpin Plt terus bertambah karena pejabat yang pensiun tidak segera diganti. Dia berharap Pemkab segera membuka proses pengisian jabatan agar roda pemerintahan tidak berjalan dengan banyak pimpinan sementara. "Kalau dibiarkan terus, nanti yang dipimpin Plt semakin banyak. Itu tentu tidak ideal untuk jalannya pemerintahan," ujarnya.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pengisian pejabat definitif sedang disiapkan. Namun, ia belum bisa memastikan waktu pelaksanaannya. "Kami ingin secepatnya, tetapi harus hati-hati. Yang dipilih harus orang yang tepat," terangnya. (ful/hen)

Jawa Pos



BM15T

GEBYAR BATIK: Seorang model menunjukkan gaun buatan pengrajin batik lokal khas Sidoarjo dalam Gebyar Batik Sidoarjo di Sidoarjo Tahun 2025. Pemkab Sidoarjo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan batik khas Sidoarjo dan udeng Pacul Gowang pada hari serta kegiatan kedinasan tertentu untuk memperkuat identitas budaya lokal.

ASN Diwajibkan Kenakan Batik dan Udeng Motif Khas Sidoarjo

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan batik khas Sidoarjo dan udeng Pacul Gowang pada hari serta kegiatan kedinasan tertentu untuk memperkuat identitas budaya lokal.

Bupati Sidoarjo, Subandi menyatakan bahwa kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) mengenai pakaian dinas ASN yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

"Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa dan lurah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kepala satuan pendidikan, serta direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo," kata Subandi, akhir pekan lalu.

Menurutnya, ASN diwajibkan mengenakan batik khas Sidoarjo setiap Kamis, sedangkan pada Jumat dan Hari Batik Nasional menggunakan batik, tenun, atau lurik, sementara perangkat daerah yang menerapkan enam hari kerja tetap memakai batik khas Sidoarjo hingga Sabtu.

Selain itu, pegawai pria yang mengenakan

pakaian dinas batik diwajibkan memakai ikat kepala udeng Pacul Gowang bermotif batik khas Sidoarjo saat apel pagi, penerimaan tamu, dan kegiatan kedinasan yang bersifat seremonial.

Pemkab Sidoarjo, lanjutnya, juga mengatur penggunaan pakaian khas daerah bermotif batik Sidoarjo pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo setiap 31 Januari maupun hari besar kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai pria dan wanita.

Melalui penerapan aturan itu, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memberikan pendampingan, kemudahan perizinan, serta akses permodalan kepada perajin batik dan pelaku usaha kreatif agar mampu memperluas pasar produknya.

"Utamakan produk UMKM Sidoarjo, dengan membeli produk UMKM lokal, kita sedang membantu memutar roda ekonomi ribuan keluarga pekerja di Sidoarjo dan menjaga kemandirian ekonomi Sidoarjo serta membuka akses pasar yang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional," ujar Subandi. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO





DAMKAR



DAMKAR SIDOARJO

HANGUS: Warga Sukodono, Supeno, menunjukkan lokasi rumah yang terbakar pada Maret.

36 Rumah Terbakar Selama Enam Bulan

SIDOARJO – Angka kebakaran di Kota Delta masih cukup tinggi. Sejak Januari-Juni, tercatat ada 101 peristiwa kebakaran. Api membakar 36 rumah.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, kebakaran banyak dipicu korsleting listrik. Dari 36 kebakaran rumah, 80 persen disebabkan hubungan arus pendek listrik. Sisanya karena kompor gas.

"Kejadian kebakaran rumah paling banyak terjadi di Candi dan Waru," jelas Yoli. Selain rumah, dia mengatakan ada jenis bangunan lain yang terbakar. Seperti tempat usaha dagang dan jasa sebanyak 22 kejadian, lahan kosong dan lahan terbuka 27 kejadian, industri 13 kejadian, serta kendaraan bermotor delapan kejadian.

Yoli menjelaskan, jumlah kejadian kebakaran tahun ini diketahui meningkat 20 kejadian dibanding periode yang sama tahun lalu. Sehingga, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang dipicu instalasi listrik di rumah. (eza/hen)

Jawa Pos

ASN Wajib Pakai Batik Khas Sidoarjo Setiap Kamis

SIDOARJO – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo kini wajib mengenakan batik khas Kota Delta setiap Kamis. Aturan tersebut mulai diterapkan pekan ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, ketentuan itu berlaku bagi pegawai ASN maupun non ASN. "Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan batik asli daerah," imbuhnya.

Khusus untuk hari Jumat yang biasanya juga pakai batik, Pemkab tidak membatasi jenis pakaian. Mereka diperbolehkan memakai batik dari berbagai daerah, termasuk tenun atau lurik. Ketentuan yang sama juga berlaku saat Hari Batik

Nasional setiap 2 Oktober.

Selain pemakaian batik, Pemkab juga mewajibkan ASN pria memakai udeng model Pacul Gowang bermotif batik khas Sidoarjo saat apel pagi, menerima tamu, maupun kegiatan seremonial. Sementara, saat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo dan kegiatan kebudayaan, ASN pria mengenakan sembung dan udeng. Untuk ASN perempuan memakai kain bawahan bermotif batik. "Semua ASN harus kompak mendukung program ini," ujar Fenny.

Menurut dia, kepala OPD diminta mengawasi penerapan aturan tersebut di instansi masing-masing. Aturan itu juga perlu disampaikan kepada seluruh pegawai agar diterapkan sesuai ketentuan. (ful/hen)



Semua ASN harus kompak mendukung program ini."

Fenny Apridawati
Sekda Sidoarjo

Jawa Pos

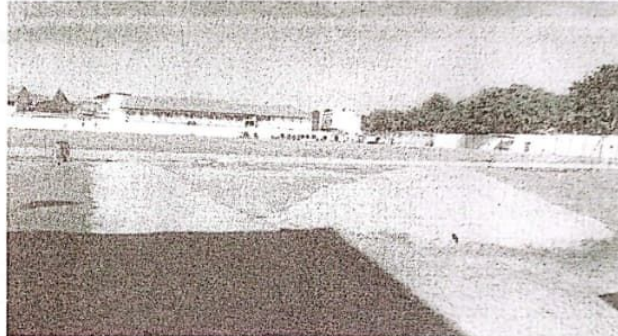
seluruh lapisan masyarakat untuk tiga orang anak. (Lir/Khol)

Proyek Stadion Jenggolo Sidoarjo Zonk Tidak Dikerjakan Dinas Bungkam Mengapa Dibatalkan Kontraktor Kecewa Berat

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti diberitakan kemarin di harian Pojok Kiri,Proyek Rehab stadion Jenggolo Sidoarjo Penunjukan Langsung (PL) senilai 277 juta sudah tanda tangan kontrak kini masih zonk belum ada proyek batal dikerjakan dan belum ada reaksi baik dari Dinas , yang bersangkutan bukan saat dikonfirmasi wartawan, via WhatsApp, Minggu,5/7/26 Sedang kontraktor Agung mantan anak mantu Pejabat kecewa berat dengan pembatalan proyek itu, ucap dia pada wartawan via telepon seluler.

Kasus ini wartawan Harian Pojok Kiri ketika investigasi di lokasi proyek Stadion Jenggolo Sidoarjo, Minggu, 28/6/26 tidak ada rehab bangunan yang tertera di LPSE Sidoarjo 2026 yang dimenangkan oleh CV Abyudaya beralamatkan Jati Selatan dengan Dirut Agung mantan anak pejabat Sidoarjo dan juga menantu pejabat Sidoarjo.Agung saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek yang di investigasi oleh wartawan masih zonk belum ada pekerjaan rehab Stadion Jenggolo, ia jawab via WhatsApp, pekerjaan proyek



Peranginan	Petang	Hari/Evaluasi	Pemegang	Pemegang Bakti
Nama Non Tender	Rehab Stadion Jenggolo			
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi			
W/LPSE/Instansi Lainnya	Kab Sidoarjo			
Satuan Kerja	Dinas Kemendagri: Disatuga dari Turunata			
Page	Rp. 225.000.000,00			
HPS	Rp. 227.949.924,59			
Nama Pemegang	Alamat	IDNWP		Marga Kewajiban
CV ABYUDAYA	J. JATI SELATAN I NO.150 RT 03 RW 01	Sidoarjo (Kab.) Jawa Timur		Marga Teknis

Jenggolo dibatalkan, katanya singkat tanpa memberikan alasan yang logis, namun ia seperti nya kecewa berat dengan kasus ini

Sementara pihak Dispora sebagai leading sektor proyek yang menempel belum memberikan stemen

terkait batal proyek tersebut.BD kontraktor mengatakan pada wartawan ada permainan dibalik batal nya proyek itu, kritiknya.Sementara ketua LSM Setia Bangsa, H Abdul menduga ada ketidakberesan terkait batal nya proyek itu, katanya.Dia



akan mengejar terus kasus ini dan ia akan Pulbaket dan Puldata dan jika nanti terbukti ada dua alat bukti tindak pidana korupsi, ia akan laporan secara resmi baik ke Kejaksaan maupun ke Polresta Sidoarjo, ucapnya. (Khol/Bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Ngeri, Banyak Temuan BPK di Proyek APBD 2025, Ancaman Pidana Mengintai

Sidoarjo, Pojok Kiri.-

LBH KHY Sidoarjo melalui kanal media sosialnya, mengeluarkan informasi mengejutkan temuan BPK terkait kelebihan bayar di beberapa proyek startegi Sidoarjo.

Dalam lamannya, LBH KHY menuliskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran senilai sekitar Rp1,9 miliar pada tujuh proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada anggaran tahun 2025.

Temuan tersebut mencakup proyek di lima OPD, di antaranya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, RSUD Sedati, double deck parkir RSUD Notopuro, Alun-Alun Sidoarjo, hingga pembangunan USB SMPN 2 Prambon.

Nilai kelebihan bayar terbesar tercatat pada pembangunan USB SMPN 2 Prambon sekitar Rp667

juta, disusul double deck parkir RSUD Notopuro sekitar Rp 403 juta, serta Gedung Hemodialisa RSUD Sidoarjo Barat sekitar Rp192 juta.

Selain temuan kelebihan bayar akibat kekurangan volume pekerjaan, BPK juga mencatat adanya kesamaan isi dokumen penawaran dari empat peserta pada salah satu paket proyek. Temuan tersebut menjadi catatan auditor karena mengindikasikan proses lelang yang dinilai tidak kompetitif.

BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan oleh penyedia jasa serta mendorong perbaikan tata kelola pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menambah daftar temuan BPK yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat NasDem mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada berbagai pa-



ket proyek konstruksi dengan nilai mencapai Rp4,124 miliar.

Temuan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan di sejumlah dinas, tujuh paket pembangunan gedung di lima perangkat daerah, serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 28 paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi.

Menurut Dimas yang juga Ketua DPD NasDem Sidoarjo itu, kondisi tersebut mengindikasikan belum maksimalnya peran pengawasan mulai dari konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Radarsidoarjo

RADAR SIDOARJO | SELASA, 7 JULI 2026 | HALAMAN 10

Bea Cukai Jatim Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 140,67 Miliar

KOTA-Kinerja pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I sepanjang semester I 2026 menunjukkan hasil positif. Selain berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 140,67 miliar dari penindakan rokok ilegal, instansi tersebut juga membukukan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 38,99 triliun, atau 44,29 persen dari target APBN 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Rusman Hadi mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil penguatan pengawasan yang berjalan be-

ringan dengan optimalisasi pelayanan kepada dunia usaha.

"Hingga semester I 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 38,99 triliun atau 44,29 persen dari target APBN. Keberhasilan ini kami imbangi dengan penguatan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal sekaligus pemberian berbagai fasilitas kepabeanan untuk mendukung dunia usaha," ujar Rusman, Senin (6/7).

Dari total penerimaan tersebut, sektor cukai masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 36,19 triliun. Sementara penerimaan Bea Masuk mencapai Rp 2,49 triliun



TEGAS: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I Rusman Hadi (tengah) memberikan keterangan kepada awak media.

dan Bea Keluar sebesar Rp 300 miliar.

Rusman menjelaskan, hingga Juni 2026 pihaknya telah melakukan 1.138 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Nilai barang

hasil penindakan mencapai Rp 1,42 triliun, meningkat sekitar 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khusus di bidang cukai, Bea Cukai Jawa Timur I

menindak 556 kasus peredaran rokok ilegal dengan barang bukti sebanyak 152,90 juta batang senilai Rp 227,4 miliar. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang ber-

hasil diselamatkan mencapai Rp 140,67 miliar.

"Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah penindakan meningkat sekitar 33 persen. Rokok ilegal yang diamankan juga naik dari 98,78 juta batang menjadi 152,90 juta batang. Pelanggaran masih didominasi rokok polos dan Sigaret Kretek Mesin (SKM)," jelasnya.

Selain memberantas peredaran rokok ilegal, Kanwil DJBC Jawa Timur I juga berhasil menggagalkan lima upaya penyelundupan narkoba dan obat-obatan tertentu, meliputi etomidate, methamphetamine, ganja, dan ketamine.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari masuk dan beredarnya barang-barang berbahaya," katanya.

Di sisi lain, Bea Cukai juga terus menjalankan perannya sebagai fasilitator perdagangan dan pendamping industri. Hingga semester I 2026, nilai penangguhan Bea Masuk yang diberikan mencapai Rp 797,35 miliar, terdiri atas fasilitas Kawasan Berikat sebesar Rp 785,15 miliar dan Gudang Berikat sebesar Rp 12,2 miliar. (dik/vga)